



LAPORAN MONEV

MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) dan SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

TRI WULAN I Tahun 2025 Bulan April s.d Juni 2025

Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

TRIWULAN KE-II TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan Bantul Yogyakarta
Telepon/Faks (0274) 520502 Website : www.ptun-yogyakarta.go.id
Email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id
Daerah Istimewa Yogyakarta



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan – Bantul – Yogyakarta 55198
Telepon : 0274 – 520502 Faximile : 0274 -581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id ; Email : info.ptunyog@gmail.com

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan Survei pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta periode Triwulan II tahun 2025.

Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam pengelolaan survei di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk monitoring dan evaluasi periode berikutnya. Hal ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan survei di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.



Yogyakarta, Juli 2025

Ketua, ✓

Dr. NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

**MONITORING,EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEY
PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAkJ
TRIWULAN II
Bulan April-Juni 2025**

A. Latar Belakang

Laporan monitoring dan evaluasi hasil survey indeks Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAkJ di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ini, dimaksudkan untuk mengetahui adanya kepuasan masyarakat dari pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Adanya Survey di Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui masukan masukan dari masyarakat selaku penerima layanan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara lebih baik lagi dan menuju pelayanan prima; Survey ini juga guna mengukur rasa kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diterima dan sarana prasarana yang diberikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Disamping itu adanya layanan dan sarana prasarana ini merupakan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan pelayanan dan sarana prasarana sebagai upaya terus untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Tujuan/Manfaat :

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi pengelolaan Sepia ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan dan kendala yang dihadapi atas proses pengelolaan survey di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan pengelolaan survey di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

C. RUANG LINGKUP MONITORING;

Sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya survei kepuasan masyarakat yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

D. Pelaksanaan Monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Pelaksanaan monitoring pengelolaan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilakukan oleh Kepaniteraan Muda Hukum dan unsur pimpinan dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan Survey kepuasan masyarakat;

Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan per triwulan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi dalam menyelesaikan masalah pengelolaan survey kepuasan masyarakat;

E. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Mekanisme pelaksanaan monitoring Pengelolaan survey kepuasan Masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.
2. Memantau langsung kegiatan pengelolaan survey kepuasan masyarakat di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

F. HASIL MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Hasil Monitoring, Evaluasi dan tindak lanjut Berdasar survei di PTUN Yogyakarta baik melalui Kehadiran secara langsung ataupun melalui Website PTUN Yogyakarta (online) :

Monitoring, Evaluasi Dan Tindak Lanjut
 SAPK dan SPKP
 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
 Tri Wulan II
 Periode April-Juni 2025

No	Triwulan/Tahun	Saran Responden	Tindak Lanjut	Keterangan
	Triwulan II – 2025	nihil	nihil	https://drive.google.com/file/d/1d-XbsimK9Qq6xqXB2P0m48WgYuzqnbkx/view?usp=drive_link , https://drive.google.com/file/d/1IDOhbQ24erOzRz1AwckPJIOdbe-Kk9Bo/view?usp=drive_link

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan :

Bahwa perubahan perubahan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sangat efektif dan dapat meningkatkan layanan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi. terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dari bulan April-Juni tahun 2025 menunjukan bahwa SPKP mayoritas memiliki Indeks rata rata 98,07. Dan SPAK 98,92 atau masuk pada kategori A (Sangat Baik).

Bahwa survei masyarakat sangat diperlukan untuk kontroling, perbaikan dan peningkatan terhadap peningkatan layanan masyarakat atau pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Rekomendasi:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk tetap menjaga Integritasnya dan pelayanan yang sudah baik untuk tetap di pertahankan dan lebih baik lagi.
- b. Survei untuk tetap dilaksanakan secara elektronik dan manual;
- c. Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjutnya untuk secara berkala tetap dilaksanakan.
- d. Pembinaan dan Pengawasan kepada Pegawai dan Petugas layanan meja PTSP untuk dilakukan secara rutin.

Demikian laporan Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), agar dapat jadi bahan perbaikan di masa akan datang.

Yogyakarta, Juli 2025

Panitera,

Mohammad Zahid, S.H.,M.H.

Panitera Muda Hukum,

Tri Asih Wahyudiani, S.H.,MKn



Mengetahui :
Ketua,

Dr.Nelly Christin, S.H.,M.H.